

**Peranan Pemerintah, Perbankan, dan UMKM dalam Mengatasi
Pengangguran Tingkat SMK dan SMA**

Izza Syafira Amalia – Renny Oktafia

Perbankan Syariah

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo – UMS

***Abstract:** Total of Senior High School and Vocational High School work force is quite high ranging 3% and 11,34%. To reduce the unemployment rate government, banking, Micro, Small, Medium Enterprises and others also create employment opportunities to reduce unemployment rate in Senior High School and Vocational High School. There are many factors that caused unemployment that is provided job opportunities, lack of ability or skill, lack of information about opportunities job, age, population density, and others.*

***Keywords:** Unemployment, UMKM, development of UMKM in Senior High School and Vocational High School, Unemployment in Indonesia*

***Abstrak:** Jumlah angkatan kerja tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) cukup tinggi yakni berkisar 3% dan 11,34%. Dalam mengurangi tingkat pengangguran pemerintah, perbankan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan yang lainnya juga saling menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran di SMA dan SMK. Banyak faktor yang menyebabkan pengangguran itu sendiri yakni terdapat beberapa faktor yang antara lain sedikitnya lahan pekerjaan yang disediakan, kurangnya kemampuan maupun keahlian, kurangnya informasi mengenai pekerjaan, faktor usia yang sudah tidak memenuhi kriteria, kepadatan penduduk dan lain sebagainya.*

Kata Kunci: Pengangguran, UMKM, Pengembangan UMKM tingkat SMA dan SMK, Pengangguran di Indonesia

PENDAHULUAN

Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa di Indonesia masalah pengangguran merupakan masalah yang signifikan yang terjadi di Indonesia. Karena masalah ini merupakan satu dari beberapa masalah terbesar yang ada di Indonesia. Dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa dari tahun 2016 pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 10.000 orang pada tahun 2017 sehingga pada tahun 2017 ini pengangguran di Indonesia berjumlah 7,04 juta orang yang pada tahun sebelumnya telah mencapai 7,03 orang. (Julianto, 2017)

Faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran itu sendiri terdapat beberapa faktor yakni antara lain sedikitnya lahan pekerjaan yang disediakan, kurangnya kemampuan maupun keahlian, kurangnya informasi mengenai pekerjaan, faktor usia yang sudah tidak memenuhi kriteria, kepadatan penduduk dan lain sebagainya.

Pemerintah, Perbankan Konvensional maupun Perbankan Syariah, dan juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga saling bergotong-royong mengatasi permasalahan ini dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan maupun membuka kelas untuk umum dengan mengajarkan beberapa bidang keahlian untuk masyarakat agar bisa membuat usaha sendiri yakni seperti Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI). Karena sesungguhnya pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan dengan melakukan usaha dengan tangannya sendiri, seperti yang tercantum dalam hadits yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Yang artinya: Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau

bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.

Pengangguran pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga banyak terjadi dan akan menyebabkan beberapa masalah karena pada umumnya lulusan baru dari SMK maupun SMA yang setelah lulus tidak memiliki kegiatan akan menimbulkan stress maupun depresi karena remaja sangat rentan terhadap hal ini.

PEMBAHASAN

Dari jumlah 131 juta orang yang merupakan angkatan kerja di Indonesia, sekitar 60% di antaranya itu telah didominasi oleh angkatan kerja yang tingkat pendidikannya dari mulai tingkat SD dan SMP. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah 131 juta angkatan kerja terdiri dari pendidikan SD dan SMP mencapai 59,6%, 16,78% pendidikan SMA 3%, 11,34% pendidikan SMK, 3% pendidikan diploma, serta 9% memiliki pendidikan D4, S1, S2, S3. (Mardiana, 2017)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pekerja dari tingkat SMA dan SMK termasuk rendah. Maka perlu dilakukan penanganan khusus agar dapat mengurangi pengangguran di tingkat SMA dan SMK, dan juga menambah jumlah lapangan kerja untuk tingkat SMA dan SMK.

Pengangguran di Indonesia ini telah menjadi sebuah masalah yang membengkak secara terus menerus. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, tingkat pengangguran yang ada di Indonesia pada umumnya hanya berkisar di bawah 5 persen dan ditahun 1997 sebesar 4,68 persen. Tingkat pengangguran sebesar 4,68 itu dianggap merupakan pengangguran dalam skala normal. (Alghofari, 2011)

Pengangguran alamiah merupakan tingkat pengangguran yang alamiah dan tak akan dapat dihindari. Artinya apabila suatu tingkat pengangguran paling tinggi 2-3 persen itu menandakan bahwa perekonomian suatu negara dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) (Sadono Sukirno, 2008).

Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang (gap) yang terus

membesar. Kondisi tersebut semakin membesar setelah krisis ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi tidak saja jurang antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang rendah terus makin dalam, tetapi juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin tinggi.

Salah satu faktor yang menyebabkan pengangguran yang semakin meningkat adalah bertambahnya jumlah penduduk yang juga diselingi dengan semakin bertambahnya harga kebutuhan pokok, maka hal ini juga harus ditanggulangi dengan menyediakan lapangan kerja yang cukup oleh pemerintah, perbankan, UMKM, maupun yang lainnya.

Dari tingkat pemerintah, pemerintah telah mengadakan Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) dimana disediakan kursus dengan berbagai bidang untuk setiap warga yang berminat dari umur 18 tahun hingga umur 35 tahun. Kursus ini dilakukan selama 6 bulan tanpa tarikan biaya dan di akhir pendidikan akan diberikan alat penunjang pekerjaan sesuai bidang masing-masing. Seperti contohnya apabila memilih kursus kecantikan maka diakhir pendidikan akan diberikan alat-alat yang berhubungan dengan bidang kecantikan, seperti make up dan lain sebagainya. Namun untuk mengikuti kursus ini harus mengikuti test terlebih dahulu dan yang lulus dalam test tersebut barulah diperbolehkan mengikuti kelas kursus.

Perbankan juga turut serta menciptakan lapangan kerja bagi tingkat SMA dan SMK untuk bekerja di perbankan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti tinggi minimal untuk wanita 160 cm dan untuk pria 170 cm, nilai minimal rata-rata raport maupun ijazah adalah 7.00, bersedia untuk ditempatkan dimanapun, dan lain sebagainya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah termasuk dalam prioritas dalam pengembangan ekonomi ditingkat nasional, selain karena UMKM menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, maupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan UMKM akan memperluas basis ekonomi dan akan bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam percepatan struktural, yakni

meningkatkan perekonomian ditingkat daerah dan ketahanan ekonomi ditingkat nasional (Kurniawan, 2011). Menurut Rosenfeld (2002), pembangunan usaha kecil ini adalah penggerak dalam rangka pembangunan nasional. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diusahakan untuk bisa menjangkau dan merata hingga sampai pada tingkat daerah pedesaan. (Dewi, 2014)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah penopang perekonomian bangsa. Pada pertengahan tahun 2011, data mengenai pertumbuhan UMKM di Indonesia menunjukkan total yang lebih dari 53 juta, dengan jumlah tenaga kerja yang bisa terserap hanya mencapai jumlah 102 juta. Dalam hal ini semakin menunjukkan besarnya potensi yang dimiliki UMKM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Nuhung, 2012). UMKM ternyata bisa membuka lapangan kerja baru untuk 9,6 juta orang, sedangkan usaha yang besar hanya bisa membuka lapangan kerja baru hanya sekitar 55,760 orang. Selain itu kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas nasional sebesar 19,9 persen (Ardiana Brahmayanti, Subaedi, 2010:44).

UMKM dalam membuka lapangan kerja mempunyai peranan penting sehingga dapat turut membantu mengurangi masalah kemiskinan di Indonesia hingga mencapai sekitar 50%. Untuk itu pemerintah hendaklah membantu mengembangkan UMKM dalam pemberian dana, dan lain sebagainya. Potensi UMKM sangat besar dalam membuka lapangan kerja ini, namun masih perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan secara intens. Untuk itu, perlu adanya dukungan dengan cara menerapkan aturan-aturan yang kondusif pada UMKM, yang tidak akan memberatkan pihak UMKM. Sementara, saat ini UMKM masih harus menanggung banyaknya biaya dan perijinan dengan waktu yang lama juga menghabiskan banyak biaya. Peraturan yang kurang mendukung UMKM ini, menjadikan hal yang bertolak belakang kepada keberlangsungannya UMKM. Pihak pemerintah seharusnya memberikan kemudahan untuk keberlangsungan UMKM terlebih dahulu, baru kemudian boleh untuk meminta hak. (Oktafia, 2017)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dapat diambil kesimpulan bahwa tidak hanya tingkat pemerintah, namun semua kalangan seperti UMKM, Perbankan, dan yang lainnya juga sama-sama membuka lapangan kerja bagi pengangguran di Indonesia khususnya tingkat SMA dan SMK.

Saran

Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan UMKM karena perkembangan UMKM akan sangat terbantu apabila pemerintah juga ikut memperhatikan perkembangan UMKM, karena dengan berkembangnya UMKM maka pengangguran juga akan terangkat karena UMKM juga menyediakan lapangan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Oktafia, Renny. 2017. "PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PERKUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI JAWA TIMUR". UIN Sunan Ampel Surabaya.. <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/11>. 1 Mei 2018.
- Muhammad. 2013. "TINJAUAN SEJARAH MEKANISME PASAR DALAM ISLAM". Telaah Bisnis. Vol. 14, Nomor 1. <http://jurnal.uin.ac.id/Millah/article/view/6025/5441>. 30 April 2018.
- Tri dan Putu. 2014. "PENGARUH MODAL, TINGKAT PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KAWASAN IMAM BONJOL DENPASAR BARAT". E-jurnal ekonomi pembangunan Universitas Udayana. Vol. 3, No. 12. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/9916>. 30 April 2018.
- Sholihuddin, Muhammad. 2011. "KEBEBASAN PASAR DAN INTERVENSI NEGARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM". Maliyah. Vol. 01, No. 01.